



PEMERINTAH PROVINSI
DINAS PARIWISATA
PROVINSI RIAU



RENCANA STRATEGIS

RENCANA
STRATEGIS
2019-2024

RENCANA
STRATEGIS
2019-2024

RENCANA
STRATEGIS
2019-2024

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2019 - 2024

(RENSTRA PERUBAHAN 2019 - 2024)

DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU
Jl. Jend. Sudirman, Komp. Bendera Serai (Plaza MTD)
Telp/Fax : (0771) 40358 Pekanbaru 20232
Website : <http://pariwisata.riau.go.id>

KATA PENGANTAR

Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Panstra) Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2).

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Panstra) ini merupakan upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau. Dengan berpedoman pada Panstra ini, diharapkan Sekretariat, Bidang-Bidang serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, seimbang dan dapat mengevaluasi setiap progress kegiatan sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD terkait dalam pembangunan Pariwisata di lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau, Kabupaten Pinar, Kecamatan Kabupaten Kota, Kecamatan
Kota Pekanbaru, Kecamatan (Statistik).

Plano Kecamatan yang telah ada, akan diperbaiki kembali.
Kuali kepada semua pihak yang telah membantu penyediaan
Terdapat Diambil Strategi (Kembali) ini, sebagai kerja sama ini dapat
ditingkatkan di mana yang akan lebih.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA	
PROVINSI RIAU	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Riau	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	53

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	55
4.1 Tujuan	55
4.2 Sasaran	55
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
5.1 Strategi	58
5.2 Arah Kebijakan	58
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDAHIAAN	60
6.1 Program Pemasaran Pariwisata	60
6.2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	61
6.3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	
Ekonomi Kreatif	62
6.4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui	
Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	63
6.5 Program Pendukung Dalam Pengembangan Pariwisata	63
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
7.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan	76
7.2 Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	76
BAB VIII. PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.2 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Perencanaan.....	26
Tabel 2.3 : Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon.....	26
Tabel 2.4 : Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan.....	26
Tabel 2.5 : Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Riau.....	27
Tabel T-C.23 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau.....	30
Tabel T-C.24 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau	34
Tabel 2.6 : Komposisi Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata.....	36
Tabel 2.7 : Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Riau.....	38
Tabel T-B.11 : Pemetaan permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	44
Tabel 3.2 : Faktor penghambat dan pendorong pelayanan dinas pariwisata provinsi riau terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah.....	46
Tabel 3.3 : Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Peranganannya.....	51
Tabel 3.4 : Permasalahan pelayanan dinas pariwisata provinsi riau berdasarkan telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan peranganannya.....	53
Tabel T-C.25 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	58
Tabel T-C.26 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	61
Tabel T-C.27 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Provinsi Riau.....	66
Tabel T-C.28 : Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : 1 Hubungan antara RPJPD dengan Rencana peningkat daerah	2
Gambar 2.1 : 1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kemudian undang-undang ini salah satunya menjabarkan tentang pembuatan Rencana Induk Kepariwisataan baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 88 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan bahwa Perencanaan Daerah antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, sejalan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Riau periode 2019-2024 merupakan amanat Peraturan Perundang-undangan yang wajib dilaksanakan. Renstra ini adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari program-program prioritas RPJMD Provinsi Riau bidang pariwisata dan pendukung program-program teknis yang ada di Dinas Pariwisata.

Renstra dinas pariwisata Provinsi Riau disusun melalui tahapan studi proses persiapan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, penumisan rancangan akhir dan

penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau maka upaya untuk mengukur kinerja baik di tingkat sasaran (dampak/ *impact*), program hasil (*outcome*) dan di tingkat kegiatan (keluaran/ *output*) secara terukur dapat terlaksana.

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, perlu adanya sinkronisasi/ketepatan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD provinsi Riau tahun 2019-2024 dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi. Renstra perangkat daerah ini merupakan pedoman bagi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan PD.

Gambar 1.1

Hubungan antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah



Sumber: Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019-2024

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa visi dan misi Kepala Daerah yang disampaikan saat Jazzy Kamparey Kepala Daerah diarahkan kedalam Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dituangkan kedalam

RPJMD, adapun visi dan misi Kepala Daerah dapat dijadikan tujuan/sasaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah serta Program Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 2020 dan 2021 telah terjadi dua perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap pembangunan pariwisata di Provinsi Riau yaitu:

1. Sejak bulan Maret tahun 2020 dan masih berlanjut sampai bulan Juni tahun 2021 ketika perubahan RPJMD Provinsi Riau disusun, terjadi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi ini menyebabkan krisis kesehatan dan juga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Anggaran pembangunan nasional serta daerah menjadi berkurang karena difokuskan untuk penanganan Covid-19, selain itu aktivitas perekonomian mengalami kontraksi dan kelucuan karena pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat maupun pelaku ekonomi yang dilakukan dalam mengurangi laju penyebaran Covid-19. Akibatnya banyak dari target-target pembangunan dalam RPJMD yang telah ditetapkan menjadi tidak tercapai.
2. Pada tahun 2020 Pemerintah telah menetapkan peraturan terbaru yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN ini merupakan pedoman bagi perencanaan nasional dan perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 pada tahun 2019 dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019. Adanya penyelesaian penyusunan RPJMN 2020-2024 pada tahun 2020 menjadi pedoman pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024.

Pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi terhadap hasil dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 tahun

pertama dan tahun kedua dengan beberapa catatan tentang perlunya dilakukan perubahan terhadap RPJMD Provinsi Riau 2019-2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana ini meliputi:

- a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19);
- e. Undang-Undang No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2035;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-6809 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
- n. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
- p. Peraturan Gubernur Riau Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Farmisita Provinsi Riau;
- q. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 61 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- r. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengerus Utaman Gender dalam Pembangunan Nasional.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud perubahan Rencana Dinas Farmisita Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah menentukan kembali arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendelkatan

secara holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial yang berbasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau memajukan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan revisi/ra Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ini yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kembali indikator, tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Provinsi Riau;
2. Merumuskan dan menetapkan kembali rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikator selama 5 (lima) tahun;
3. Merumuskan dan menetapkan kembali strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah pasca Covid-19 guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019-2024 mengacu kepada Permendagri No.86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana K/L dan Rencana
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEHLIAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN HIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU

Dinas Pariwisata Provinsi Riau membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Provinsi Riau dibidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, selanjutnya Penyelenggaraan Pemerintahan ini harus dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan meningkatkan nilai tambah kepariwisataan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Dinas / Badan. Pasal 211 ayat (1) menyatakan Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan. Dengan demikian, Dinas Pariwisata Provinsi Riau merupakan Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pariwisata.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau, pada Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif,
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung oleh 109 pegawai dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

- 1. Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi pada bidang Pariwisata.
- 2. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata.

b. Sekretariat

- 1. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.
- 2. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat

- Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pariwisata;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan tugas:
- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum;
 - d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Dinas Pariwisata;
 - e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;

- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Parawisata;
 - h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Dinas Parawisata;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpog, karis/karvu, kartu akses/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, penunjukan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; penitipan pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan, antara lain melaksanakan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
 - k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substantif Perencanaan Program pada Sekretariat, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program,
 - b. pengkajian, pengkajian, penyusunan dan pengurusan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah,

- Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Dinas Pariwisata;
- d. pelaksanaan penyiapan dan realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran pada Dinas Pariwisata dan
- e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Dinas Pariwisata.
- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substantif Keuangan, Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan barang milik daerah;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya;
 - d. penyusunan dokumen rencana tahunan dan penganggaran barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada lingkungan Dinas Pariwisata;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya;

- g. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau penuntasan data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Pertendaftaran dan Tuntutan Ganti Rugi;
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja; dan
- j. pelaksanaan pengarsipan, penantunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah.

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

1. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengumpulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata, antara lain meliputi pengembangan sumber daya manusia pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya pariwisata dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;

- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - f. pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Dalam pelaksanaan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional
6. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - b. persiapan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan dan pembinaan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Usaha Jasa Pariwisata di Provinsi Riau
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder dan lembaga-lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata.

- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Usaha Jasa Pariwisata pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Usaha Jasa Pariwisata;
 - b. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan jasa usaha pariwisata;
 - c. pengiapan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan dan jasa pariwisata di Provinsi Riau;
 - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder dan lembaga- lembaga pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi usaha dan jasa pariwisata;
 - f. pelaksanaan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di Kabupaten/Kota;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kelembagaan usaha dan jasa pariwisata;
 - h. pelaksanaan kemitraan sertifikasi dan verifikasi usaha dan jasa pariwisata;
 - i. pelaksanaan pembinaan usaha dan penutupan pedoman usaha pariwisata skala Provinsi; dan
 - j. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jasa usaha pariwisata.
- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Pemberdayaan Masyarakat Parawisata;
- b. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan yang bersangkutan dengan kepariwisataan kepada masyarakat sekitar destinasi parawisata;
- c. pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam membina kepariwisataan, sapta persona pada masyarakat di sekitar destinasi parawisata; dan
- d. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Parawisata.

d. Bidang Destinasi Parawisata

1. Bidang Destinasi Parawisata menyelenggarakan tugas yang terkait dengan objek daya tarik wisata, sarana dan prasarana parawisata, pengkajian dan pengembangan destinasi parawisata.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Destinasi Parawisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengurusan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Destinasi Parawisata;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Destinasi Parawisata;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi parawisata antara lain meliputi objek daya tarik wisata, sarana dan prasarana parawisata, pengkajian dan pengembangan destinasi parawisata;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Destinasi Parawisata dengan Sekretariat

Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait.

- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Destinasi Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan tugas kefinansian lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional
- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Objek Daya Tarik Wisata pada Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Objek Daya Tarik Wisata;
 - b. pelaksanaan pendataan dan identifikasi yang terkait dengan objek daya tarik wisata, termasuk data dan informasi serta pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan kawasan pariwisata dan objek daya tarik pariwisata;
 - d. pelaksanaan sinergisitas pengembangan Objek Daya Tarik Wisata secara terpadu dengan Kabupaten/Kota, stakeholder pariwisata lainnya dan instansi terkait;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas objek daya tarik wisata;
 - f. melaksanakan pembinaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Provinsi Riau; dan
 - g. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan objek daya tarik wisata.

- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan stakeholder dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana pariwisata;
 - c. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Provinsi;
 - d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata;
 - d. pengkajian dan evaluasi terhadap sumber-sumber potensi daya tarik dan atraksi wisata; dan
 - e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Kepariwisata.

c. Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengembangan pasar, sarana promosi, dan promosi.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pemasaran pariwisata;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata, antara lain meliputi pengembangan pasar, sarana promosi, dan promosi;
 - d. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Pemasaran Pariwisata dengan Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengarsipan, penantiaian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional
 - Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Pasar pada Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Pengembangan Pasar;

- b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi potensi pasar pariwisata di dalam dan luar negeri;
 - c. pelaksanaan identifikasi, analisis produk dan merencanakan pengembangan pasar pariwisata;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pendukung di bidang informasi dan strategi pemasaran skala provinsi, nasional dan internasional;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan pasar pariwisata skala provinsi, nasional dan internasional;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengembangan pasar pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Pazar.
- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Subseksi Sarana Promosi pada Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Sarana Promosi;
 - b. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan sarana promosi;
 - c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana promosi pariwisata;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang dokumentasi dan distribusi bahan sarana promosi;
 - e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sarana Promosi.

- e. Subkoordinatir Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi pada Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Promosi;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan promosi pariwisata;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama dalam rangka promosi pariwisata;
 - d. pelaksanaan promosi pariwisata skala Provinsi, Nasional dan Internasional;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Promosi.

f. Bidang Ekonomi Kreatif

1. Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerja sama pengembangan ekonomi kreatif.
2. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ekonomi Kreatif, antara lain meliputi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif.

- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - e. pelaksanaan tugas koordinasi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya pada Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional/prosedur Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 - b. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - c. pelaksanaan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya; dan
 - f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.
 - Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional/prosedur Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- b. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. pelaksanaan dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan ekonomi kreatif berbasis media, desain, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - f. pelaksanaan pengurusan, penempatan, evaluasi pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Pengetahuan dan Teknologi.
- Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substantif Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di Provinsi Riau;
 - c. pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten/ Kota dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif dalam peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;

- f. memberi dukungan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- g. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.

g. Kepala UPT. Bandar Serai

1. Seksi Tata Usaha

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menSurat;
- e. melaksanakan fasilitas administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. melaksanakan penitipan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas kefinansian lain yang diberikan atasannya sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sarana dan Prasarana;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Bandar Seni Raja Ali Haji;
- d. melakukan revitalisasi sarana dan prasarana seni pertunjukan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana dan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Seni Raja Ali Haji dan Anjungan Seni Idrus Tintin;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Seni Raja Ali Haji dan Anjungan Seni Idrus Tintin;
- c. memutuskan kebutuhan sarana dan prasarana pada Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Seni Raja Ali Haji dan Anjungan Seni Idrus Tintin;
- d. melaksanakan layanan, pengelolaan dan pengembangan UPT Bandar Seni Raja Ali Haji;
- e. melakukan koordinasi dengan stakeholder lain dalam kegiatan kegiatan UPT Bandar Seni Raja Ali Haji;
- f. menyelenggarakan promosi, pameran, dan event di UPT Bandar Seni Raja Ali Haji;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengelolaaan dan Pengembangan; dan
- h. melaksanakan tugas kefinansian lain yang diberikan sesuai sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau



2.2. Sumber Daya Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Sebagai bagian dari perangkat kerja Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung oleh 109 pegawai dengan perincian sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JENJIR BELAKANG	GOLONGAN							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	SMU	S-1	S-2	S-3	
1	LATD-LATD	0	0	8	2	23	12	-	45
2	PERSEKIPUAN	0	0	17	2	24	8	-	51
	JUMLAH	0	0	25	4	47	20	-	109

Sumber : Data Perkembangan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2021

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Diblat Perjenjangan

NO	JENJIR BELAKANG	ASTHAF KOR IV	STAKA KOR III	STAKOR KOR II	STAKU KOR I	JUMLAH
1	LATD-LATD	6	4	1	-	11
2	PERSEKIPUAN	11	4	-	-	15
	JUMLAH	17	8	1	-	26

Sumber : Data Perkembangan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2021

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Eselon

NO	JENJIR BELAKANG	ESKELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LATD-LATD	-	1	4	15	20
2	PERSEKIPUAN	-	-	2	8	10
	JUMLAH	-	1	6	23	30

Sumber : Data Perkembangan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2021

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

NO	JENJIR BELAKANG	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	LATD-LATD	0	8	33	10	51
2	PERSEKIPUAN	0	8	45	8	61
	JUMLAH	0	16	78	18	109

Sumber : Data Perkembangan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2021

Untuk menunjang pelaksanaan layanan perkantoran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Riau memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan urusan Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Riau

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	3	-
2.	Alat-Alat Angkutan	15	Mini bus, sepeda motor roda tiga.
3.	Alat Bengkel	1	Genet 27 KWH dan 15 KWH
4.	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.772	PC multimedia, meja, meja tamu, kursi kerja, rak kayu, filing cabinet, white board, kursi lipat, mesin penghisap, AC split, PC-work station, meja rapat, almari kayu, microphone, note book, printer, stabiliser, mesin ketik, magnetic white board, kursi putar, kopek angina standing, kopek angina, meja rapat, kursi rapat, kursi tamu, meja computer, AC window, talenan, Amp. TOA, Amp. Wireless, pompa air, computer, meja kerja, floor light box, roll up banner, flexy frame, brankas, indoor photo G, Windspot, foto even desk, ventilasi VAV, DVD player, T. Pemadam Kebakaran, scanner, peralatan jaringan internet, nemi next TIC, papan informasi, rak buku, sirine penunjuk waktu, kursi counter TIC, meja workstation, kursi leather, ceiling fan, projector, lampu billboard, folding gate, almari pakaian, almari arsip kaca, gorden, UPS.
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	64	Kamera digital, handycam, faxmille EXFT, blitr 3B 28, sound system.
6.	Bangunan Gedung	67	Gedung dan bangunan 2 objek wisata di kab. Kota

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
7.	Jaringan	11	Jaringan listrik, instalasi telepon PABX
8.	Buku perpustakaan	3500	Buku kepustakaan dan buku hukum
9.	Barang bercorak kesenian / kebudayaan	4.103	Batik tulis dalam pigura

Sumber : Data Real Bagan Keuangan, Pelaksanaan dan Pengeluaran Korang Misk Daerah Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan maupun pelaksanaan teknis pengembangan dan penguatan pada bidang kepariwisataan daerah Provinsi Riau. Hal ini berarti bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki peranan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Utama Tipe A Peningkat Swas	Tipe KPI	Tipe KPI	Tipe KPI KPI	Tipe Rencana Peningkat Swas Tahun					Rencana Operasional Tahun					Rencana Operasional Tahun				
					Tipe					Tipe					Tipe				
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (JMS)				12.871	24.338	10.809	79.227	22.044	34.157	66.130	100.904	148.938	148.948	1.02	1.31	1.44	1.28	1.83
2	Jumlah wisatawan domestik (JMS)				25	26	0	0	0	3	5	0	0	0	1.2	0.26	0	0	0
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (JMS)				12	8	0	0	0	8	10	0	0	0	0.72	1.23	0	0	0
4	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (JMS)				10	24	0	0	0	17	16	0	0	0	0.25	0.5	0	0	0
5	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (JMS)				26	26	0	0	0	24	26	0	0	0	0.52	0.53	0	0	0
6	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (JMS)				200	200	0	0	0	110	200	0	0	0	1.58	2.17	0	0	0
7	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (JMS)				7	13	0	0	0	7	103	0	0	0	1.20	6.73	0	0	0

No	Subsistem Struktur Organisasi Tingkat Atas Tingkat Pembantu Tingkat Bawahan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021-2025					Realisasi Capaian Tahun 2018-2020					Realisasi Capaian tahun 2021-2025				
					2021					2018					2018				
					2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Pemeliharaan sarana produksi industri tekstil, termasuk perbaikan mesin dan bangunan gedung				21	21	0	0	0	21	208	0	0	0	1,20	8,84	0	0	0
5	Guna tenaga masyarakat (Man)				0	0	4,20	4,20	4,2	0	0	2,84	2,87	2,46	0	0	2,84	2,81	2,781

Sumber: Dokumen Rencana Strategis (Rencana) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2018-2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara melebihi target yang sudah ditetapkan. Destinasi wisata di Provinsi Riau masih diminati oleh wisatawan, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 101.904 orang, sehingga pada tahun 2018 jumlah wisatawan mancanegara telah mencapai 146.935 orang dan telah melebihi target indikator kinerja tahun 2018.

Pencapaian kinerja tersertifikasinya SDM dan pelaku di bidang pariwisata adalah peningkatan kualitas pelayanan untuk wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Kualitas pelayanan yang baik terhadap wisatawan diharapkan memberikan impresi yang baik dan menimbulkan keinginan untuk kembali berkunjung. Pada tahun 2015 dan 2016 selalu meningkat sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan disebabkan pengurangan anggaran.

Indikator kinerja yang berhubungan dengan lama tinggal wisatawan baru dapat diukur pada tahun 2021. Indikator capaian kinerjanya <100% yaitu lama tinggal wisatawan. Hal ini disebabkan Paket-paket wisata yang masih dijual oleh para agen perjalanan masih banyak menjual destinasi-destinasi wisata yang sudah cukup dikenal luas dan perlu memotivasi dan memfasilitasi perjalanan wisata agar lebih berperan aktif dalam membuat terobosan baru, khususnya wisata malam dan atraksinya sehingga dengan terobosan tersebut wisatawan akan lebih lama lagi tinggal di Provinsi Riau.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya rasio antara realisasi dan anggaran program dalam periode Renstra 2014-2019, diantaranya adalah :

1. Masih minimnya minat investor dalam menanamkan investasinya di bidang kepariwisataan;
2. Kurangnya penanaman jiwa bisnis kepariwisataan bagi seluruh elemen masyarakat;
3. Masih diperlukannya kerjasama secara menyeluruh dalam pengembangan pariwisata dalam segala aspek;
4. Ketatnya persaingan pasar tingkat nasional.

Upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah melaksanakan program-program strategis, yaitu:

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
2. Program pemasaran pariwisata;
3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat dari realisasi belanja langsung.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumasa
Provinsi Riau

T	Anggaran Tahunan				Realisasi Anggaran Tahunan						Saldo Anggaran Lebih dan Utang Daerah					Saldo Akhir	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Anggaran Tetap	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2019	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2020																	
2021																	
2022																	
2023																	
2024																	
2025																	
2026																	
2027																	
2028																	
2029																	
2030																	
2031																	
2032																	
2033																	
2034																	
2035																	

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Peringkat Daerah Dinas Perumasa Provinsi Riau

Secara umum, dalam pelaksanaan program Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam kurun waktu 2015-2019 rasio antara realisasi dan anggaran berjalan dengan baik rata-rata berfluktuasi dibawah 1 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengelolaan Pendapatan Pelayanan Perangkat Daerah antara lain dipengaruhi oleh situasi keuangan global dan nasional dimana terjadi penurunan anggaran pada tahun 2016.

Dari sisi penganggaran Dinas Pariwisata Provinsi Riau mendapat dukungan dana APBD dalam melaksanakan kegiatan urusan pariwisata. Dukungan dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian anggaran pada masing-masing bidang dan UPT yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Riau juga telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gambaran perkembangan anggaran dan realisasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel diatas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada arah kebijakan yang tertuang pada Rencana Kementerian Pariwisata Tahun 2020-2024, pemerintah pusat mengarahkan pembangunan pariwisata pada empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dengan demikian, agar tercapai pembangunan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah, khususnya di Provinsi Riau maka arah kebijakan pembangunan pariwisata di Provinsi Riau pun hendaknya sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat terus diperluas dan dikembangkan menjadi sektor strategis dan menjadi pilar pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 20 juta, dan pergerakan wisatawan nusantara sebesar 275 juta perjalanan pada tahun 2020. Oleh karena itu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi langkah percepatan terpenuhinya target tersebut.

Tabel 2.6 Komparasi Sasaran Rencana Dinas Pariwisata Provinsi Riau terhadap Sasaran Rencana Kementerian Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Sasaran Rencana Dinas Pariwisata Prov. Riau	Sasaran pada Rencana Kementerian Pariwisata
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	109.028	20 juta
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,42	-

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara merupakan indikator kinerja yang menjadi sasaran baik pada tingkat Provinsi hingga ke level Pemerintah pusat. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara masih berada dalam tingkatan provinsi saja.

Pada indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara adapun target dalam renstra yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Riau adalah 109.026 orang wisatawan sedangkan target dalam renstra kemenpar adalah 20 juta orang wisatawan.

Sedangkan untuk indikator kinerja rata rata lama tinggal wisatawan mancanegara target dalam renstra yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Riau adalah 2,42 hari.

Adapun peluang maupun hambatan dalam pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau selama lima tahun ke depan, berupa telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah yang ada juga perlu dilakukan. Hal ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pariwisata. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pariwisata dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pariwisata dalam lima tahun mendatang. Disaitkan dengan indikator program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTPW, Dinas Pariwisata dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTPW tersebut.

strategi apa yang akan dipilih dalam membangun kepariwisataan dan ekonomi kreatif Provinsi Riau oleh Dinas.

Dalam mengembangkan industri Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Riau dihadapkan kepada tantangan dan peluang. Adapun tantangan/tantingannya antara lain :

1. Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
2. Daya saing produk wisata yang belum optimal;
3. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
4. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal;
5. Kesenjangan pembangunan antar kawasan pariwisata;

Sementara itu peluang keberhasilan pembangunan pariwisata sebagai prioritas pembangunan provinsi yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata antara lain :

1. Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki;
2. Posisi strategis kewilayahan;
3. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
4. Perkembangan tren pasar wisatawan;
5. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif;
6. Potensi pengembangan unsur-unsur ekonomi kreatif di Provinsi Riau.

Dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan Provinsi Riau pada tatanan nasional, harus pula memperhatikan positioning daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kepariwisataan daerah Provinsi Riau yang secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau seyogyanya memperhatikan pula perkembangan kepariwisataan dan kebudayaan di 4 (empat) Provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan dibidang pariwisata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Parwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk menanggarkan persatuan dan kesatuan, penghapusan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, peningkatan ekonomi dan industri, dan pengembangan teknologi.

Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang masih potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah-tamahan pelayanan serta kearifan lokal masyarakat, sedikit sekali sumberdaya yang harus digunakan untuk mendukung kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah seyakinya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah karena salah satu daya tarik dari pariwisata itu sendiri adalah dengan tampilan kesantian dan kebudayaan.

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dan berkembang dalam penyediaan barang dan jasa yang mendukung industri pariwisata. Syarat utama dari hal tersebut diatas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam mengembangkan sektor kepariwisataan di Provinsi Riau, Dinas Pariwisata telah mengidentifikasi berbagai isu-isu strategis yang perlu ditelaah dan ditindaklanjuti dalam menyusun program dan kegiatan dalam kurun waktu 2019-2024. Isu-isu tersebut yang menjadi fokus utama pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau adalah :

3.1.1. Isu Internal

Isu internal yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Riau tidak terlepas dari keterbatasan SDM Pariwisata baik dalam mengelola, mengembangkan maupun dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Masih belum optimalnya kualitas promosi pariwisata;
- 2) Atraksi wisata yang ada di Provinsi Riau belum beragam;
- 3) Masih banyak destinasi wisata di Provinsi Riau yang belum siap dipromosikan kepada wisatawan mancanegara;

- 4) Masih banyak SDM pariwisata yang belum tersertifikasi;
- 5) Pengembangan & pemasaran ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Pemanfaatan potensi pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata;
- 7) Pengelolaan pariwisata yang belum optimal;
- 8) Infrastruktur yang mendukung aksesibilitas destinasi wisata yang belum optimal

3.1.2. Isu Eksternal

Isu eksternal yang strategis dan sangat berdampak dalam perkembangan pariwisata di Provinsi Pisa tidak terlepas dari isu strategis yang terjadi pada situasi pariwisata global saat ini, pandemi corona virus (Covid-19) yang awalnya berasal dari wuhan, Republik Rakyat China yang terjadi pada bulan desember 2019 telah menimbulkan dampak sektor kepariwisataan diseluruh dunia.

Penyebaran Covid-19 yang begitu masif berdampak signifikan terhadap pariwisata nasional maupun internasional. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) memperkirakan terjadinya penurunan kedatangan wisatawan internasional sebesar 58 % hingga 78 % pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

UNWTO menyatakan bahwa penurunan kedatangan wisatawan internasional ini bernakita hilangnya penerimaan turis internasional sebesar US\$910 miliar hingga US\$ 1,2 triliun secara global, berdasarkan trend kedatangan turis sebelumnya maka diperkirakan 5 hingga 7 tahun penurunan pertumbuhan pariwisata akan terjadi pasca pandemi covid-19 ini.

Selain sisi negatif, pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak lain yaitu pihak berwenang terkait seperti halnya Kementerian/Esaparekrat harus merubah model bisnis pemain pariwisata nasional dari yang semula traditional tourism management menjadi digital tourism management sehingga menjadi peluang dalam mempertahankan dan memulihkan sektor ekonomi

kreatif berbasis digital juga dapat menjadi solusi lain dalam meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB.

Selain penerapan digital management dalam pengelolaan pariwisata saat ini, penerapan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environmental sustainability*) dalam penerapan standar pelayanan pariwisata saat ini juga dipandang sangat penting mengingat para wisatawan telah patuh dengan standar protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas wisata dimanapun berada karena mereka tetap menginginkan pariwisata yang bersih, sehat, aman dan nyaman pada masa dan pascapandemi covid-19.

Ditetapkannya Permasalahan - permasalahan dalam pelayanan pada Dinas Pariwisata Provinsi Riau beserta faktor - faktor yang mempengaruhinya untuk memudahkan bagi Dinas Pariwisata untuk menentukan arah kebijakan serta prioritas pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	masalah faktik	Masalah	akar Masalah
A	B	C	D
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara	Masih banyak destinasi wisata di provinsi riau yang belum mendukung kenyamanan wisatawan mancanegara
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Masih belum optimalnya kualitas prasarana pariwisata
			Atraksi wisata yang ada di Provinsi Riau belum beragam
			Masih banyak SDM pariwisata yang belum terakreditasi
			Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2019.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi Kepala Daerah yang terdapat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu :

Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)

Untuk mencapai visi tersebut maka Kepala Daerah menetapkan beberapa misi yaitu :

- Misi 1:** Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- Misi 2:** Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Misi 3:** Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
- Misi 4:** Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
- Misi 5:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Bertolak pada visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau, Pembangunan Pariwisata masuk pada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. Upaya dalam mencapai misi ini akan dicapai dengan tujuan :

Meningkatkan daya saing pariwisata daerah dengan indikator jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, sasaran yang dituju adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara di provinsi Riau. Adapun strategi yang digunakan adalah :

- 1) Peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
- 2) Peningkatan promosi pariwisata.

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: <i>Pengembangan Riau yang Berdaya Saing, Agrikultur, Berkeadilan dan Berpacu di Indonesia</i>				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pencapaian Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 4: <i>Mempertahankan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.</i>			
	Program: <i>Pelestarian pariwisata.</i>	Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara	Kurang optimalnya aktivitas promosi	Sensitivitas berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata
	Pengembangan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Masih rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara	Pengembangan destinasi wisata di Provinsi Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata Provinsi Riau yang menjadi kawasan pariwisata kano/kota	Terdapatnya <i>Go2all</i> sebagai pembangunan pariwisata daerah pada pemerintah provinsi
	Pengembangan wisata dari pariwisata dan ekonomi kreatif	Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1. Masih banyak SDM pariwisata yang belum terampilisasi 2. Kurangnya koordinasi antar lembaga pariwisata dalam mengembangkan pariwisata	1. Terdapatnya program dan kegiatan pengembangan dan SDM pariwisata 2. Tingginya perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi dalam mengembangkan SDM pariwisata
	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan partisipasi dari masyarakat lokal	Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1. Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap	1. Terdapatnya peluang pasar lokal 2. Meningkatnya jumlah strategi wisata

Visi: Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Berkualitas, Berkeadilan dan Berprestasi di Indonesia				
No.	Misi dan Program RTR dan Sub-RTR Terpadu	Permasalahan Pokok yang Prioritas Riau	Taktik	
			Berdaya Saing	Berkualitas
			1. peningkatan kapabilitas/menyerap 2. atraksi Wisata yang ada di Provinsi Riau belum tergarap	

Sumber: Hasil Pertemuan Pemangku Riau, 2019

Pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataann Provinsi (RIPPAPROV) Riau Tahun 2021-2035 disebutkan bahwa visi pariwisata provinsi Riau adalah terwujudnya Riau sebagai pusat pariwisata haisl dunia berbasis budaya Melayu dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut maka pemerintah provinsi Riau menyusun misi pembangunan kepariwisataan yaitu:

1. Membangun destinasi pariwisata haisl berkelas dunia mengacu pada nilai-nilai budaya dan prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.
2. Membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan merujuk tinggi nilai-nilai religius dan kearifan budya masyarakat Riau.
3. Membangun pemasaran pariwisata terpadu, bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Membangun sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan yang andal.

Adapun sasaran pembangunan kepariwisataan yangdituju adalah:

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekraf terhadap ketahanan ekonomi
2. Meningkatnya nilai tambah ekraf nasional
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional.

5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
7. Terlindungnya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan kreatif
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan kreatif berbasis kajian
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan kreatif
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisata dan kreatif
11. Terwujudnya reformasi birokrasi kemenparekraf menuju birokrasi yang profesional

3.3. Telsahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi yaitu Visi Presiden Republik Indonesia, hal ini berarti bahwa visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga Visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah :

Pariwisata dan Ekonomi kreatif Indonesia yang maju berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi Kemenparekraf/Baparekraf juga harus selaras dengan Misi Presiden Republik Indonesia, sehingga Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu :

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing ;
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga;

- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- (9) Sistem pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam melaksanakan roda pembangunan nasional Kemendparekrat/Esperakrat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran dan indikator yang ada dalam pedoman rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), namun pembangunan tersebut juga tetap harus mengacu kepada rambu-rambu peraturan yang berlaku seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 bahwa Kemendparekrat tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah maupun pelaksanaan, bintek dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan hal tersebut dilakukan melalui koordinasi strategis lintas sektoral berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2014 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggara kepariwisataan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi urusan Pemerintah bidang pariwisata baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk halnya Kemendparekrat/Esperakrat adalah sebagai berikut :

1. Sub Urusan Destinasi Pariwisata

Penetapan daya tarik wisata kawasan, strategi pariwisata dan destinasi pariwisata.

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Nasional dan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPN & DPP);
- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional& Provinsi (KSPNA & KSPF);
- Pengelolaan Kawasan Pengembangan dan Pembangunan Nasional & Provinsi (KPPN & KPPP);
- Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas daerah provinsi.

2. Sub urusan pemasaran pariwisata, meliputi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata nasional.

3. Sub uraian pengembangan ekonomi kreatif melalui melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, melalui pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria.
4. Sub Uraian pengstimulasi sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat ahli.

Dalam acuan dokumen rencana strategis (renstra) Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024, terdapat sasaran strategis nasional yang ingin dicapai yaitu "meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional".

Adapun jika dilihat dari sisi perspektif customer Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis yaitu : (1) Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif Nasional (2) meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan, (3) Meningkatnya daya saing destinasi dan industry pariwisata nasional (4) Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan (5) Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industry sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, (6) terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada perspektif internal proses, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : (1) Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kapten, (2) Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif, (3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SUM kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Pada sisi perspektif learn and growth Kemenparekraf/Baparekraf memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu "Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional".

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, telah ditetapkan tujuan pembangunan pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu Meningkatnya

kontribusi Pariwisata dan Ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi Nasional. Pencerapan tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Nilai Deriva Pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Tabel 3.2. Fernalalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran K/L dan Renstra Bah/ku	Fernalalahan Pelayanan Dinas Provinsi Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Jangka Menengah K/L	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau	1. Salim	1. Potensi
1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan kreatif terhadap ketahanan ekonomi	membantu kontribusi maksimal terhadap	optimatnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata dan wahana dan serta dunia usaha dalam pembangunan pariwisata	1. Keberhasilan dan ketahanan pariwisata yang sudah
2.	Meningkatnya nilai tambah kreatif nasional	perkembangan wisatawan mancanegara	2. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan akomodasi kreatif kurang mendukung	2. Peningkatan strategi pemerintah
3.	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan		3. Kurangnya kemampuan anggotan Pektasir/Peakt	3. Peningkatan strategi pemerintah
4.	Meningkatnya daya tarik destinasi dan wisata pariwisata nasional			3. Peningkatan strategi pemerintah
5.	Pertumbuhan produk pariwisata sesuai kebutuhan			3. Peningkatan strategi pemerintah
6.	Berkembangnya investasi dan daya pendukung untuk pariwisata dan ekonomi kreatif nasional			3. Peningkatan strategi pemerintah
7.	Pertumbuhan kemandirian intelektual bidang pariwisata dan kreatif			3. Peningkatan strategi pemerintah
8.	Pertumbuhan regulasi pariwisata dan kreatif berbasis keaja			3. Peningkatan strategi pemerintah
9.	Pertumbuhan data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan kreatif			3. Peningkatan strategi pemerintah

No.	Ketersediaan dan Kualitas Kehidupan	Peningkatan Pelayanan Objek Pariwisata	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
	10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan lokal 11. Peningkatan pelayanan terhadap wisatawan internasional melalui layanan yang profesional			

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2019

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Beberapa isu yang memberikan dampak negatif bagi pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam RTRW Provinsi Riau antara lain: perubahan penutupan hutan, ancaman keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air dan ancaman bencana lingkungan seperti banjir. Hal tersebut erat kaitannya dengan kekuatan objek pariwisata di provinsi Riau yang masih didominasi oleh objek wisata alam yang sangat tergantung pada kondisi alamiah landscape untuk dinikmati para wisatawan yang mengunjungi objek tersebut.

Beberapa isu yang memberikan dampak positif bagi pembangunan bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam RTRW provinsi Riau antara lain : peningkatan taraf hidup, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang kerja. Hal ini juga erat kaitannya dengan interaksi pelaku usaha bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif serta dukungan masyarakat di sekitar objek wisata dalam hal penyediaan jasa dan usaha terkait. Pada beberapa destinasi objek khusus interaksi ini sudah menghasilkan hasil yang mengembirakan dengan tumbuhnya usaha-usaha pariwisata seperti hotel, homestay, rumah makan, restoran, pedagang cinderamata dan fasilitasi kegiatan-kegiatan pariwisata lain.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau Berdasarkan Telaahan RTRW Seperti Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Kerangka Tematik Ruang Wilayah Terbatas Topik dan Fokus Dinas Pariwisata Riau	Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Riau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kemampuan terkait untuk pengembangan karangstangsi pembangunan Ekowisata	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Riau dibatasi oleh keterbatasan sumberdaya	1. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan ekonomi kreatif kurang mendukung	1. Potensi karangstangsi dan karangstangsi pariwisata yang dimiliki
2	Kemampuan penataan pusat-pusat kegiatan untuk memajukan pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah	Permasalahan Provinsi dalam mengembangkan ekowisata yang menjadi kawasan pengembangan pariwisata lokal/kota	2. Keterbatasan kemampuan anggaran, Pemda/Pemk n dalam mendukung ekowisata di daerahnya	2. Potensi strategi karangstangsi 3. Peningkatan kreatifitas pariwisata melalui pengembangan kawasan karangstangsi Pariwisata Nasional (KSPN)
3	Kemampuan penataan kawasan wisata dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan			

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau, 2018

3.4.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan surat edaran nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang penetapan rincian pembangunan jangka menengah daerah berwawasan lingkungan yang ditetapkan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan pada 4 april 2021, menuntut pedoman untuk kepala daerah mengenai mission RPJMD yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, terutama dalam aspek indeks kualitas lingkungan hidup, perindugan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Berdasarkan kajian KLHS pengembangan pariwisata harus memaksimalkan sumber daya wisata/pemasaran yang menarik berbasis media sosial dan pengelolaan terpadu, namun tetap mengutamakan prosedur kunjungan sesuai protokol kesehatan, pengembangan pariwisata yang menjaga kelestarian alam/eco-friendly (sustainable tourism).

meningkatkan upaya pelestarian kearifan lokal melalui pembinaan kebudayaan, kesenian dan pengelolaan bangunan sejarah dan edukasi, serta menargetkan kaum muda untuk lebih mencintai kearifan lokal daerah masing-masing.

3.5. Penentuan *isu-isu* Strategis

Penentuan *isu-isu* strategis mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang menyangkut kebijakan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Pada awal masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2019 telah ditetapkan visi “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU) selanjutnya misi Kepala Daerah yaitu “Memajukan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing”. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Provinsi Riau “Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, Nusantara dan meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara”.

Adapun Implikasi RTRW dengan pelayanan Dinas Pariwisata akan saling mempengaruhi, hal itu dikarenakan dalam menetapkan suatu kawasan destinasi pariwisata terdapat pedoman yang mengaturnepentuan batas wilayah yang tertuang dalam RTRW, sehingga kawasan yang tidak diperuntukkan untuk Destinasi pariwisata tidak dapat dikembangkan.

Mengenai keterkaitan Pelayanan pariwisata dengan KLS yaitu arah pengembangan pariwisata harus mengakomodir konsep *eco friendly* /ramah lingkungan serta mengurangi dampak emisi dan polusi rumah kaca seperti pengembangan beberapa destinasi wisata mangrove, wisata agro, serta Destinasi wisata lainnya di Provinsi Riau yang tetap mengakomodir kebutuhan ramah lingkungan seperti penyediaan tempat sampah, penyediaan sanitasi yang baik di tiap – tiap destinasi.

Adapun *isu-isu* strategis dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Riau dipengaruhi oleh beberapa factor meliputi *isu* strategis Internasional, *isu* strategis Nasional dan *isu* strategis Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis digital untuk mengurangi pelemahan ekonomi diseminasi aspek sehingga akan mempengaruhi strategi pemulihan ekonomi nasional yang ditempuh pemerintah oleh berbagai negara dalam merespon perekonomian global yang belum kuat. Teknologi digital merupakan salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka, perkembangan dunia usaha saat ini beriringan dengan pemanfaatan teknologi digital yang akan memberikan dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dinas Pariwisata Provinsi Riau berupaya melakukan peningkatan pengembangan teknologi melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha ekraf terutama bagi usaha pemula.
- b. Pemanfaatan potensi Pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana Destinasi wisata di Provinsi Riau sebagian besar merupakan wisata Alam. Hal ini dikarenakan Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki luas hutan hujan tropis yang terbesar. Keterbatasan akses menuju destinasi pariwisata saat ini yang dirasa perlu untuk dilakukan perbaikan. Beberapa kendala yang dihadapi saat ini diantaranya adalah Lokasi tempat wisata yang cukup jauh ke dalam hutan dan keadaan jalan yang belum memadai untuk dilewati kendaraan menjadi penghambat wisatawan untuk berlibur. Kendala selanjutnya yaitu sarana dan prasarana di Destinasi wisata yang saat ini masih dirasakan kurang representatif oleh para wisatawan. Apabila akses, sarana dan prasarana sudah dibenahi maka jumlah kunjungan wisatawan diharapkan akan meningkat. Dalam upaya membenahi sarana dan prasarana penunjang di Destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata bekerjasama/berkolaborasi dengan instansi terkait baik kementerian maupun perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran Dekonsentrasi, CSR dan sponsorship.
- c. Pengelolaan Pariwisata meliputi pengembangan destinasi, pengembangan kualitas Sumber daya Manusia Pariwisata, peningkatan ekonomi kreatif dan kerjasama pemasaran Pariwisata.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Pariwisata Provinsi Riau sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau adalah: Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata.

4.2. Sasaran

Sasaran pembangunan pariwisata di Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara

Sasaran ini merupakan sasaran tindak dari pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Segala kegiatan dan event yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau semuanya bermuara bagi upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke Provinsi Riau.

2. Meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara

Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara dijadikan salah satu sasaran dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Riau adalah karena ini merupakan parameter sejauh apa peningkatan perekonomian daerah yang kita dapatkan dari sektor pariwisata. Semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan ke Riau dan semakin lama mereka berada di Riau, maka semakin besarlah income yang diperoleh oleh Provinsi ini. Hal ini juga berkaitan dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat Riau itu sendiri.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan nilai tambah pariwisata		Jumlah Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Milyar Rupiah)	1.244,97	915,47	877,33	1052,80	1315,98	1811,08
		Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (jiwa)	145.565 (wisman)	67.599 (wisman)	52.816 (wisman)	63.379 (wisman)	79.223 (wisman)	109.028 (wisman)
		Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (jiwa)	6.918.390 (wisnus)	7.510.965 (wisnus)	5.706.958 (wisnus)	5.205.099 (wisnus)	6.000.920 (wisnus)	6.945.168 (wisnus)
		Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,67	1,45	2,25	2,32	2,35	2,42

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai dari penetapan rencana strategi pembangunan pariwisata selama periode 2019-2024 adalah untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata provinsi riau, sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada periode tersebut adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan serta meningkatnya kenyamanan wisatawan, sehingga wisatawan yang belum berkunjung akan tertarik untuk datang ke Provinsi Riau dan wisatawan yang sudah pernah datang akan kembali mengulang perjalanan wisatanya.

Adapun data pada indikator kinerja jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara yang pernah dicapai pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.244,97 milyar adalah berdasarkan data sebelum wabah pandemi covid-19 melanda sektor pariwisata dunia, berikutnya baseline data awal untuk kita dapat menarik kembali arahan untuk menentukan target capaian selanjutnya adalah dimulai pada tahun 2021 sebesar 877,33 milyar rupiah, kemudian selanjutnya meningkat sebesar 1.062,80 pada tahun 2022 dan seterusnya, begitu juga terhadap indikator kinerja yang lain.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Pariwisata di Provinsi Riau, strategi yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
2. Peningkatan promosi pariwisata;

5.2. Arah Kebijakan

Mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi (RIPPRAPROV) Tahun 2021-2035 dalam menentukan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun kedepan di wilayah Provinsi Riau terdapat 4 KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi), dan 5 (lima) KPPP (Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi). Adapun Yang termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi adalah:

1. KSPP Pariwisata Cagar Budaya Kampar-Kuantan dan Sekitarnya
2. KSPP Pariwisata Sejarah Kerajaan, Siak-Bengkalis dan sekitarnya
3. KSPP Ekowisata, Pelalawan-Indragiri dan Sekitarnya
4. KSPP Palerasi Pantai, Dumai-Pupat dan Sekitarnya.

Selain KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi) terdapat juga 5 (lima) KPPP (Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi) yang akan dikembangkan antara lain:

1. KPPP Pariwisata Warisan Masa Lalu, Rokan Hilir dan Sekitarnya
2. KPPP Pariwisata Religi, Rokan Hulu dan Sekitarnya
3. KPPP Pariwisata Perkotaan, Pekanbaru, dan Sekitarnya
4. KPPP Pariwisata Bahari, Indragiri Hilir dan Sekitarnya
5. KPPP Pariwisata Pulau-Pulau kecil, Bengkalis-Kepulauan Meranti dan Sekitarnya

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :	Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Demokratis, dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 4 :	Mewujudkan Riau, Malayu Sebagai Payung Segi dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berdaya Saing			
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	AKSI KEBIJAKAN
Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	1	Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara	Peningkatan pengalihan destinasi wisata	Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata
	2	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara		
	3	Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara	Peningkatan promosi pariwisata	Meningkatkan promosi dan kelayakan pariwisata
				Mengembangkan destinasi kreatif secara terpadu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan Kegiatan merupakan upaya dari tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan program-program yang telah di tetapkan.

Secara garis besar program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam kurun waktu 2019-2024 meliputi:

- a. Program Pemasaran Pariwisata;
- b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dan agar program-program tersebut dapat dilaksanakan dan berhasil baik, perlu dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.1. Program Pemasaran Pariwisata;

Tujuan program ini adalah:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik Wisatawan Nusantara maupun Wisatawan Mancanegara;
2. Mengembangkan event pariwisata daerah untuk menjadi event pariwisata provinsi, nasional dan internasional;
3. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi Wisata Syariah;
4. Mendukung pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE)*.

6.2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Tujuan program ini mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta didukung oleh kebudayaan Melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal, dengan sasaran Jumlah Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sebanyak 7 KSPF sampai akhir tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan di tingkat Nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

A. Pengembangan Daya Tarik Wisata

Kegiatan ini secara global meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan
2. Pengembangan Daya Tarik Wisata

B. Pengembangan paket wisata unggulan

Kegiatan ini berupa pembinaan dan fasilitasi penyusunan paket wisata, antara lain penyusunan pola perjalanan (*travel pattern*).

C. Peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata

Dalam rangka peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata, untuk pembangunan dan peningkatan jalan, Dinas Pariwisata harus bekerjasama dengan Dinas Bina Marga Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, sedangkan untuk peningkatan sarana transportasi dan pengaturannya, Dinas Pariwisata akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan serta Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan Cukai, serta instansi yang menangani karantina di wilayah setempat.

D. Peningkatan koordinasi pengembangan Daerah Tujuan Wisata dengan lembaga/dunia usaha

Kegiatan ini antara lain berupa rapat koordinasi, *workshop* dengan lembaga/dunia usaha dalam rangka pengembarangan Daerah Tujuan Wisata termasuk dalam upaya memperliah investor untuk pembangunan daya tarik wisata. Dalam rangka

memp peroleh investor, dilakukan kerjasama promosi investasi dengan SKPD yang mengelola promosi dan penanaman modal daerah.

6.3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan program ini antara lain:

- a. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap SDM dan pelaku Pariwisata, termasuk penguatan jati diri sebagai masyarakat berbudaya melayu;
- b. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan Pariwisata;
- c. Mendukung pengembangan Provinsi Riau sebagai Destinasi Wisata Syariah;
- d. Mendukung pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Destinasi *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition (MICE)*;
- e. Melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan kapasitas terhadap SDM dan pelaku pariwisata, termasuk penguatan jati diri sebagai masyarakat berbudaya melayu, dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata;
- f. Membina dan memfasilitasi pengembangan desa-desa yang berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan kenyataan di tingkat nasional, kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- (1) Pembinaan dan Fasilitasi Industri Pariwisata;
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata;

Dalam rangka mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai daerah tujuan wisata MICE, akan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk membina industri dan pelaku pada wisata MICE. Salah satu yang harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya lembaga yang akan bekerjasama dengan berbagai asosiasi untuk melakukan

penawaran bagi kegiatan-kegiatan MICE yang akan dilakukan oleh berbagai pihak.

6.4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;

Tujuan program ini adalah:

1. Melakukan pembinaan, fasilitasi terhadap pelaku ekonomi kreatif agar mampu menciptakan peluang usaha dan memperluas lapangan kerja di bidang ekonomi kreatif berbasis Seni Budaya, Media, Desain dan IPTEK;
2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan ekonomi kreatif Berbasis Seni Budaya Media dan IPTEK.

6.5. Program Pendukung Dalam Pengembangan Partisipasi

Selanjutnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh bidang-bidang dan UPT di lingkungan Dinas Pariwisata, Sekretariat Dinas Pariwisata melaksanakan Program Penunjang Unitas Pemerintahan Daerah.

Tabel 5.1a
(Tabel T-C.27 Permendagri No. 86 Tahun 2017
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata
Provinsi Riau

Tahap	Jenis	Indikator Keberhasilan	Kode				Kategori Kegiatan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Substansi	Estimasi Biaya Awal (Rp) (2016)	Detail Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan		Perkiraan Biaya Penanggung Jawab
										Tujuan	Per	
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
			1	20	22		Pariwisata				21.000.402.402,00	Batas Program 00
			2	20	22	21	Dinas Pariwisata				21.000.402.402,00	
			3	20	22	21	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Pemohonan Keluaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		3.000.000.000,00	
						201	Persediaan Jasa Lokal Minimal	Jumlah surat yang dibuat		1.040.000,00	3.000.000,00	
						202	Persediaan Jasa Kemudahan Nomor Data dan Data Terpadu	Jumlah rekening yang dibuat		20 rekening	300.000.000,00	
						204	Persediaan Jasa Keluaran Kantor	Jumlah surat persediaan jasa keluaran kantor		20 bulan	200.000.000,00	
						207	Persediaan Aset Fisik Kantor	Jumlah jasa aset fisik kantor yang disediakan		20 tahun	200.000.000,00	
						208	Persediaan barang modal dan perlengkapan	Jumlah jasa laporan yang disediakan		20 tahun	200.000.000,00	
						209	Persediaan komputer, media elektronik dan perlengkapan komputer kantor	Jumlah komputer, media elektronik dan perlengkapan komputer kantor yang disediakan		20 tahun	20.000.000,00	
						210	Persediaan media dan rumah	Jumlah peralatan dan rumah yang disediakan		24 bulan penuh	200.000.000,00	
						211	Reparasi, pemeliharaan dan perbaikan di luar daerah	Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan di luar daerah		400 kali	600.000.000,00	
						212	Persediaan jasa administrasi kantor	Jumlah biaya administrasi kantor yang disediakan		60 00	1.000.000.000,00	
						213	Persediaan jasa keamanan kantor	Jumlah biaya keamanan yang disediakan		70 00	1.000.000.000,00	

Tahun	Semester	Indikator Kinerja	Tipe				Tingkat Urutan Prioritas dan Regulasi Minat Masyarakat	Indikator Kinerja Program/Keagenan (2019-2020)	Sesuai Rencana Kerja (2019-2020)	Detail Kinerja Program dan Kegiatan		Peringkat Biaya Pelaksanaan
										2019		
										Target (Rp)	%	
(2021)	(2022)	(2023)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)		
			1	20	40	20	Program Peningkatan Service dan Pemasaran Aplikasi	Peningkatan Pemasaran Service dan Pemasaran Aplikasi	100		847.388.244,00	Berkas Harian
							201	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	11 Unit	47.400.000,00	
							202	Pengamanan Kulkas Bekas Gedung Kantor	Jumlah kulkas gedung kantor yang dihilangkan	10 Pcs/Unit	112.200.000,00	
							204	Pengamanan Kulkas Bekas Layanan One-Stop-Service	Jumlah kulkas One-Stop-Service yang dihilangkan	1 Unit	111.400.000,00	
							204	Pengamanan Kulkas Bekas Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dihilangkan	144 Unit	144.387.000,00	
			1	20	40	20	Program Pemasaran Perumahan	Jumlah Produk Perumahan yang berhasil dipasarkan produk perumahan yang berhasil dipasarkan	45		9.387.708.000,00	Berkas Harian
							201	Pengadaan promosi perumahan	Pengadaan promosi yang disediakan	1 Unit	840.000.000,00	
							202	Pengadaan Saluran Promosi	Saluran promosi yang disediakan	1 Unit	100.000.000,00	
							203	Saluran pengiklanan iklan dan layanan perumahan	Jumlah layanan perumahan yang mendapatkan iklan dan layanan perumahan	10 Pcs/Unit	200.000.000,00	
							204	Pemasangan Saluran Perumahan	Saluran iklan yang disediakan	1 Unit	171.000.000,00	
							205	Pemasangan Saluran Perumahan	Jumlah iklan perumahan yang disediakan	10 Pcs/Unit	100.000.000,00	
							207	Pengembangan dan Pemasaran Saluran Baru, Kantor (Saluran Perumahan)	Jumlah iklan yang disediakan	100 Pcs/Unit	100.000.000,00	
							208	Pengembangan dan Pemasaran Saluran Perumahan	Jumlah iklan perumahan yang disediakan	10 Pcs/Unit	100.000.000,00	
							209	Pengembangan dan Pemasaran Saluran Perumahan	Jumlah iklan perumahan yang disediakan	10 Pcs/Unit	100.000.000,00	
							209	Pengembangan dan Pemasaran Saluran Perumahan	Jumlah iklan perumahan yang disediakan	10 Pcs/Unit	100.000.000,00	

Tahun	Semester	Indikator Kinerja	Tahun				Kategori Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (2019-2020)	Sumber Dana/Realisasi Anggaran	Detail Kinerja Program dan Kegiatan		Pemerintah Daerah Pelaksana/Instansi				
			2019							2020						
			2019							2020						
(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)						
			2	20	11	18		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1		640.000.000,00	Bekerja Sama			
							2021	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	2	2021	80.000.000,00		Bekerja Sama		
							2022	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	2	2022	160.000.000,00				
			8	20	11	17		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1		400.000.000,00	Bekerja Sama			
							2023	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	2	2023	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2024	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	2	2024	160.000.000,00				
			3	20	11	18		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1		1.000.000.000,00	Bekerja Sama			
							2025	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2025	1.200.000.000,00		Bekerja Sama		
							2026	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2026	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2027	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2027	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2028	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2028	160.000.000,00				
							2029	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2029	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2030	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2030	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2031	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2031	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2032	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2032	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2033	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2033	160.000.000,00				
							2034	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2034	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2035	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2035	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2036	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2036	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2037	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2037	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2038	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2038	160.000.000,00				
							2039	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2039	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2040	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2040	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2041	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2041	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2042	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2042	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2043	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2043	160.000.000,00				
							2044	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2044	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2045	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2045	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2046	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2046	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2047	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2047	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2048	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2048	160.000.000,00				
							2049	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2049	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2050	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2050	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2051	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2051	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2052	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2052	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2053	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2053	160.000.000,00				
							2054	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2054	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2055	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2055	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2056	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2056	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2057	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2057	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2058	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2058	160.000.000,00				
							2059	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2059	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2060	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2060	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2061	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2061	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2062	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2062	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2063	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2063	160.000.000,00				
							2064	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2064	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2065	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2065	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2066	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2066	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2067	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2067	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2068	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2068	160.000.000,00				
							2069	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2069	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2070	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2070	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2071	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2071	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2072	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2072	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2073	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2073	160.000.000,00				
							2074	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2074	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2075	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2075	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2076	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2076	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2077	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2077	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2078	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2078	160.000.000,00				
							2079	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2079	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2080	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2080	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2081	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2081	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2082	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2082	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2083	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2083	160.000.000,00				
							2084	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2084	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2085	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2085	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2086	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2086	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2087	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2087	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2088	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2088	160.000.000,00				
							2089	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2089	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2090	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2090	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2091	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2091	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2092	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2092	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2093	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2093	160.000.000,00				
							2094	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2094	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2095	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2095	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2096	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2096	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2097	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2097	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2098	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2098	160.000.000,00				
							2099	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2099	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2100	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2100	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2101	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2101	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2102	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2102	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2103	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2103	160.000.000,00				
							2104	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2104	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2105	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2105	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2106	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2106	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2107	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2107	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2108	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2108	160.000.000,00				
							2109	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2109	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2110	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2110	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2111	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2111	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2112	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2112	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2113	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2113	160.000.000,00				
							2114	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2114	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2115	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2115	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2116	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2116	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2117	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2117	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2118	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2118	160.000.000,00				
							2119	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2119	160.000.000,00	Bekerja Sama			
							2120	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2120	160.000.000,00		Bekerja Sama		
							2121	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2121	160.000.000,00			Bekerja Sama	
							2122	Pengembangan SDA dan SDM	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah provinsi yang dilaksanakan pada provinsi	1	2122	160.000.000,00				Bekerja Sama
							2123	Pengembangan								

Unit	Topic	Sub-Topic	Learning Objectives	Assessment Methods	Resources	Duration	Notes
Unit 1: Introduction to Chemistry	Atomic Structure	Atoms and Molecules	Understand the structure of atoms and molecules.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
		Isotopes	Identify isotopes and their applications.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Radioactivity	Understand the types of radioactivity and their effects.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Chemical Bonding	Understand the types of chemical bonds and their properties.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
Unit 2: Matter and Its Properties	States of Matter	States of Matter	Understand the properties of solids, liquids, and gases.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
		Changes of State	Understand the processes of melting, boiling, and condensation.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Diffusion and Osmosis	Understand the processes of diffusion and osmosis.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Properties of Matter	Understand the properties of matter and their applications.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
Unit 3: Chemical Reactions and Equations	Chemical Reactions	Chemical Reactions	Understand the types of chemical reactions and their equations.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
		Chemical Equations	Understand the balancing of chemical equations.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Chemical Reactions and Equations	Understand the types of chemical reactions and their equations.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Chemical Reactions and Equations	Understand the types of chemical reactions and their equations.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
Unit 4: Acids, Bases, and Salts	Acids, Bases, and Salts	Acids, Bases, and Salts	Understand the properties of acids, bases, and salts.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
		Acids, Bases, and Salts	Understand the properties of acids, bases, and salts.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Acids, Bases, and Salts	Understand the properties of acids, bases, and salts.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Acids, Bases, and Salts	Understand the properties of acids, bases, and salts.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
Unit 5: Metals and Non-Metals	Metals and Non-Metals	Metals and Non-Metals	Understand the properties of metals and non-metals.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
		Metals and Non-Metals	Understand the properties of metals and non-metals.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Metals and Non-Metals	Understand the properties of metals and non-metals.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Metals and Non-Metals	Understand the properties of metals and non-metals.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
Unit 6: Carbon and Its Compounds	Carbon and Its Compounds	Carbon and Its Compounds	Understand the properties of carbon and its compounds.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
		Carbon and Its Compounds	Understand the properties of carbon and its compounds.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Carbon and Its Compounds	Understand the properties of carbon and its compounds.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Carbon and Its Compounds	Understand the properties of carbon and its compounds.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
Unit 7: Periodic Table of Elements	Periodic Table of Elements	Periodic Table of Elements	Understand the periodic table of elements and its properties.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
		Periodic Table of Elements	Understand the periodic table of elements and its properties.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Periodic Table of Elements	Understand the periodic table of elements and its properties.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Periodic Table of Elements	Understand the periodic table of elements and its properties.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
Unit 8: Chemical Reactions and Equations	Chemical Reactions and Equations	Chemical Reactions and Equations	Understand the types of chemical reactions and their equations.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	
		Chemical Reactions and Equations	Understand the types of chemical reactions and their equations.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Chemical Reactions and Equations	Understand the types of chemical reactions and their equations.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	1 week	
		Chemical Reactions and Equations	Understand the types of chemical reactions and their equations.	Classroom discussion, Homework	Textbook, Periodic Table	2 weeks	

Unit	Lesson	Topic	Objectives	Activities	Assessment	Resources
Unit 1: Introduction to English	1.1	Greetings and Introductions	Students will be able to greet and introduce themselves.	Role-play, Dialogue practice	Self-assessment, Peer review	Textbook, Audio materials
	1.2	Basic Grammar: Nouns and Verbs	Students will understand the basic structure of a sentence.	Grammar exercises, Writing practice	Quiz, Homework	Textbook, Worksheets
	1.3	Vocabulary: Common Words	Students will learn and use common English words.	Flashcards, Matching exercises	Classroom activity	Flashcards, Worksheets
	1.4	Reading: Simple Texts	Students will be able to read and understand simple English texts.	Reading aloud, Comprehension questions	Classroom activity	Textbook, Reading materials
Unit 2: Basic Grammar	2.1	Present Tense	Students will use the present tense correctly.	Grammar drills, Sentence construction	Quiz, Homework	Textbook, Worksheets
	2.2	Past Tense	Students will use the past tense correctly.	Grammar drills, Sentence construction	Quiz, Homework	Textbook, Worksheets
	2.3	Future Tense	Students will use the future tense correctly.	Grammar drills, Sentence construction	Quiz, Homework	Textbook, Worksheets
	2.4	Conditionals	Students will understand and use conditional sentences.	Grammar drills, Sentence construction	Quiz, Homework	Textbook, Worksheets
Unit 3: Reading and Writing	3.1	Reading Comprehension	Students will be able to read and understand longer texts.	Reading aloud, Comprehension questions	Classroom activity	Textbook, Reading materials
	3.2	Writing Practice	Students will be able to write simple paragraphs.	Writing exercises, Peer review	Classroom activity	Textbook, Writing materials
	3.3	Grammar Review	Students will review and reinforce their grammar knowledge.	Grammar drills, Sentence construction	Quiz, Homework	Textbook, Worksheets
	3.4	Vocabulary Review	Students will review and reinforce their vocabulary knowledge.	Flashcards, Matching exercises	Classroom activity	Flashcards, Worksheets
Unit 4: Speaking and Listening	4.1	Listening Comprehension	Students will be able to listen and understand spoken English.	Listening exercises, Dictation	Quiz, Homework	Textbook, Audio materials
	4.2	Speaking Practice	Students will be able to speak and understand spoken English.	Role-play, Dialogue practice	Self-assessment, Peer review	Textbook, Audio materials
	4.3	Grammar Review	Students will review and reinforce their grammar knowledge.	Grammar drills, Sentence construction	Quiz, Homework	Textbook, Worksheets
	4.4	Vocabulary Review	Students will review and reinforce their vocabulary knowledge.	Flashcards, Matching exercises	Classroom activity	Flashcards, Worksheets

[illegible]

Sl. No.	Particulars	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...

No	Kelas	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	Kompetensi Dasar	Indikator	Alokasi Waktu										Jumlah Pertemuan		Keterangan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
2	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
3	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
4	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
5	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
6	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
7	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
8	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
9	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	
10	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.2	10.1.1.1.1.3	10.1.1.1.1.4	10.1.1.1.1.5	10.1.1.1.1.6	10.1.1.1.1.7	10.1.1.1.1.8	10.1.1.1.1.9	10.1.1.1.1.10	10.1.1.1.1.11	10.1.1.1.1.12	

No	Materi	Sub Materi	Indikator	Materi Pokok	Materi Tambahan	Metode Pembelajaran										Media Pembelajaran		Alokasi Waktu	Keterangan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau, maka dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu :

7.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan merupakan hasil akhir atau output dari keseluruhan proses dan aktivitas keparawisataan yang dilaksanakan untuk mengukur kinerja pembangunan pariwisata di Provinsi Riau.

7.2. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara

Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara merupakan dampak kumulatif dari kuantitas maupun kualitas daya tarik pariwisata yang ada di Daerah Tujuan Wisata, serta adanya pelayanan yang baik dari industri dan masyarakat yang menjadi pelaku di bidang pariwisata.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1. (Tabel 7-C.26 Permendagri No. 86 Tahun 2017) :

Tabel 7.1
(Tabel T-C.28 Permendagri No.36 Tahun 2017)
Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mangacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Penguasaan Wastawan Manufaktur (bilangan bulat)	1.544,31	815,47	877,68	1.062,80	1.551,88	1821,08	1811,08
2	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (juta)	142.888 (revisi)	87.888 (revisi)	61.814 (revisi)	48.879 (revisi)	79.888 (revisi)	109.888 (revisi)	109.028 (revisi)
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (juta)	6.918.890 (revisi)	7.270.888 (revisi)	8.706.888 (revisi)	8.208.899 (revisi)	8.800.890 (revisi)	8.948.168 (revisi)	8.948.168 (revisi)
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,87	1,48	1,18	2,88	2,18	1,42	2,42

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan langkah untuk meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019-2024. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kontribusi berbagai stakeholders serta dukungan SDM Aparatur bidang pariwisata yang berkualitas dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya. Sumber daya manusia berkualitas yang memiliki jiwa *entrepreneurship* juga sangat diharapkan dalam mendorong kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Sering dengan Visi Gubernur Provinsi Riau yang ingin mewujudkan Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang diperlukan dukungan dari peran aktif dari semua pihak untuk mewujudkannya.

Dengan demikian pengembangan Pariwisata yang salah satu tujuannya dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan kerjasama semua pihak.

**DINAS PARIWISATA
PROVINSI RIAU
2022**

**MATRIK PENYUSUNAN RENSTRA PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
A. DAFTAR ISI, TABEL, GAMBAR							
	Daftar Isi				✓	-	- Sesuai Substansi
	Daftar Tabel				✓	-	- Sesuai Substansi
	Daftar Gambar				✓	-	- Sesuai Substansi
1. BAB I PENDAHULUAN							
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Perangko Daerah, fungsi Rencana Perangko Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Perangko Daerah, keterkaitan Rencana Perangko Daerah dengan RPMD, Rencana RKD dan Rencana pembangunan/kegiatan lain dengan Rencana Perangko Daerah.			✓	-	- Sesuai Substansi
	1.2. Landasan Hukum	Mencakup penjelasan tentang undang-undang, peraturan			✓	-	- Sesuai Substansi

NO	NAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN HYPOD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		pendekatan, Peraturan Daerah, dan informasi peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang diadopsi secara dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.					
	1.3 Maksud dan Tujuan	Maksud penyusunan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Perangkat Daerah.			✓	-	- Sesuai substansi
	1.4 Sistematis Pendekatan	Menguraikan profil kabupaten dalam penyusunan Rencana Perangkat Daerah, serta ukuran garis besar di dokumen.			✓	-	- Sesuai substansi
2.	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH						
		Maksud informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengaitkan secara regional dan			✓	-	- Sesuai Substansi

NO	BAR	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Salah satu sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah pemerintahan lokal dan fungsinya, mengemukakan peranan-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan strategi periode sebelumnya, dan mengungkap hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu ditangani melalui Rencana Perangkat Daerah ini.					
	2.1 Tujuan, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Mencakup penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu satuan dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur			✓	✓	✓ Sesuai ketentuan

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RHMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		institusi Perangkat Daerah disiapkan untuk memonitoring organisasi, pejabat personal, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).					
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, alat/peralatan, dan unit usaha yang masih operasional.			✓	✓	- Sesuai Substansi
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Bagian ini memaparkan tugas-tugas kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPSP untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Indikator indikator kinerja seperti MDG's atau indikator yang telah diadopsi oleh pemerintah.	SAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah - Diuraikan dengan detailnya	Tabel 1.C.23 Tabel 1.C.24	✓	✓	- Sesuai Substansi
	2.4 Tantangan dan	Bagian ini menguraikan hasil			✓	✓	- Sesuai Substansi

NO	BAB	SUBSTANSI/MATERI	INTEGRASI DENGAN HPIMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Keluang Pengembangan Pelayanan: Perangkat Daerah	analisis terhadap Rencana K/L dan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten/Akota (untuk provinsi) dan Rencana Perangkat Daerah provinsi untuk kabupaten/kota), hasil analisis terhadap RTW, dan hasil analisis terhadap RLS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengelompokan pelayanan yang dibutuhkan.					
3	BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH						
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tipe dan Fungsi	Pada bagian ini diuraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi	BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah - Deskripsi dengan	Tabel 1-8.15	✓	-	- Sesuai Substansi

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Pelayanan Perangkat Daurah	permasalahan dicoverkan pada hasil pengisian Tabel 1-R.33	utucannya.				
3.1	Totipotensi, Vira, Misi, dan Pengaruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terhadap	Ragion ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan vira, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 1-R.33). dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian vira dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan penyusunan isi draftnya pelayanan Perangkat Daerah	Bab V, Vira, Misi, Tujuan dan Sasaran Ditentukan dengan urutannya		✓	-	- Sesuai Substansi

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN IPM/O	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	3.3 Trikotasi Rencana K/L dan Rencana	Raport ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dilihat dari sisi lain jangka menengah Rencana K/L ataupun Rencana Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.			✓	-	- Sesuai Substansi
	3.4 Trikotasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Lingkungan Hidup Strategis	Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dilihat dari implikasi RTRW dan RLHS.			✓	-	- Sesuai Substansi
	3.5 Perencanaan dan Strategi	Pada bagian ini diuraikan kembali faktor-faktor dari perencanaan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dilihat dari: 1. Gambaran pelayanan	Bab IV. Analisis dan Strategi - Deskripsikan dengan urutannya		✓	-	- Sesuai Substansi

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Perangkat Daerah; 2. Survei jangka menengah pada Rencana K/L; 3. Survei jangka menengah dan Rencana Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 4. Reproduksi RTW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan 5. Reproduksi RKS bagi pelayanan Perangkat Daerah Selanjutnya diuraikan metode penelitian, yaitu strategi dan hasil penelitian untuk strategi tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja itu strategi yang akan dituangkan melalui Rencana Perangkat Daerah tahun rencana.					
4.	BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN						
	4.3 Tujuan dan Sasaran jangka menengah	Pada bagian ini diuraikan tujuan	Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Tabel 1-25	✓		Sesuai Substansi

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RP/MD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	Meningkatkan perangkat Daerah	Dan secara jangka menengah Perangkat Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Daerah. Serta indikator kinerja daerah dalam tabel T.C.25.	Berpelaksanaan kepada indikator Sasaran Fokus Daerah.				
5	BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIHAKSARAN						
		Fakta tujuan dan dilaksanakan tujuan penyusunan strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dan Tabel T. C.26.	Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Rencana dan komponen dari program dan dan RPMD juga berkaitan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.	Tabel T.C.26	✓	-	Struktur Substansi

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/ SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SEDIA	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERUBAHAN
6	BAB VI- RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN						
		Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1 yang bersumber dari Tabel 1-C27.	BAB VII, Kinerja Pendanaan Pembangunan dan Program Peringkat Daerah	Tabel 1-C27	✓	-	- Sesuai Substansi
7	BAB VII. KINERJA PENGELOMPOKAN BIDANG URUSAN						
		Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Peringkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Peringkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian target dan urusan khusus. Indikator kinerja Peringkat Daerah yang terdapat pada	BAB VII, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tabel 1-C28	✓	-	- Sesuai Substansi

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPMD	TABEL SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SEDIA	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
		Isi dan isi dari RPMD ini diintegrasikan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel 7.4.2.					
8	BAB VIII PENUTUP				✓	-	- Sesuai substansi

Pribandari, 01 September 2022

Mengetahui,

KETUA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPEDAKOTA PROVINSI BATAK

ARIMAN
Pribandari, 01/09/22
NIP. 19740516 200322 3 006

Verifikasi

1. RITA SARI, S.N.
Pribandari, 01/09/22
NIP. 19740516 200322 3 006



2. RITA SARI, S.N.
Pribandari, 01/09/22
NIP. 19740516 200322 3 006

